

APPENDIX

The Script Of The Second Debate Governor And Vice Governor Candidates Election Of DKI Jakarta 2017 – 2022

Debat Final Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua untuk periode lima (5) tahun kedepan, pada tahun 2017 bertempat di Hotel Bidakara Jakarta. Penyelenggara acara adalah tim dari KPU DKI Jakarta. Debat diadakan sebagai salah satu bentuk kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon sesuai dengan keputusan KPU DKI Jakarta tentang pedoman pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan juga peraturan KPU terkait dengan kampanye. Acara ini berlangsung pada tanggal 12 April 2017.

Perbedaan debat putaran kedua ini dengan putaran pertama yaitu diakomodirnya pertanyaan dari publik, tepatnya lewat komunitas yang akan diajukan secara langsung. Seleksi dan verifikasi komunitas dilakukan oleh para panelis. Hal ini sesuai dengan tema, yaitu dari masyarakat untuk Jakarta. Ada tiga bagian pertanyaan, yaitu berasal dari para panelis, pertanyaan dari publik atau komunitas, dan dilanjutkan dengan pertanyaan antar paslon. Tim panelis berjumlah 7 orang yang sebelumnya hanya 4 panelis. Tim panelis terdiri dari Siti Zuhro selaku Pengamat Politik, Riyono Cipto Heriyanto (Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), Enny Sri Hartati (Direktur Institut for Development of Economis and Finance/INDEF), Gugun Heryanto (Dosen komunikasi pilitik UIN Jakarta), Meuthia Ganie Rochman (Sosiologi Bidang Organisasi di Universitas Indonesia), Yayat Supriatna (Dosen Perencanaan wilayah dan kota Universitas Trisakti) dan Imam Prasodjo (Dosen Sosiologi Universitas Indonesia). Untuk Publik/komunitas yang nanti aka memberikan pertanyaan yaitu dari Komunitas UMKM, Komunitas Masyarakat Transportasi, Komunitas Permukiman dan Rumah Susun, Komunitas Nelayan dan Komunitas Pendidikan dan Disabilitas.

Peserta debat kali ini adalah dari paslon nomor urut dua yaitu Basuki Tahja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, dan paslon nomor urut tiga yaitu Anis Rasyid Baswedan beserta Sandiaga Salludin Uno. Keseluruhan debat akan berjalan dengan durasi selama 2jam dengan tema Isu Kesenjangan Penegakan Hukum dan Modus Demografi dan subtema Transportasi, Permukiman, Reklamasi, Pelayanan Publik dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Umum (UMKM). Adapu peraturannya, akan ada pertanyaan yang harus dijawab masing-masing paslon dengan waktu tertentu kemudian jawaban tersebut akan saling ditanggapi oleh paslon lainnya. Boleh melakukan kritik ataupun argumen jika berbeda atau menunjukkan lebih jelas mengapa solusi dan program paslon yang satu lebih baik dibanding paslon lainnya.

Pembukaan acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak. Lalu masuk pada keseluruhan acara.

Peraturan untuk segment ini, masing-masing paslon diberikan kesempatan untuk memberikan jawabannya, dan paslon yang mendapatkan pertanyaan pertama memberikan tanggapan sebagai penutup. Pertanyaan dijawab dengan kesempatan durasi 2menit.

Segment 1 (Pertanyaan dari para Panelis)

Moderator : “Sesuai ketentuan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang disusun pemerintah daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD. Berkaca dari kasus yang pernah ada, alotnya pembahasan yang disebabkan oleh sikap oknum DPRD yang meminta kompensasi sebagai syarat untuk menggolkan proyek-proyek yang diusulkan. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana anda akan menyikapi hal tersebut tetapi seminimal mungkin membuat RAPBD serta program pelayanan publik yang anda usulkan terhambat oleh sikap penolakan sejumlah fraksi di DPRD? Jawaban dimulai dari paslon dua terlebih dahulu.

Jawaban dari Ahok

“Bagi kami, sebenarnya tidak terlalu susah, karena kami mengalami sendiri kejadian ini pada tahun 2015. Yang paling penting adalah bagaimana kita membuat transparansi. Dari usulan masyarakat sudah menggunakan smart city. Siapa yang usul dan untuk apa, sehingga ketika naik semua data dari masyarakat bisa terlihat ke kecamatan, tidak bisa hilang. Untuk persoalan ke DPRD, kita tidak boleh suudzon kepada semua anggota dewan. Karena banyak anggota dewan juga yang baik sebetulnya, hanya oknum tertentu saja yang ada kepentingan. Tetapi sudah kita jelskan situasi sekarang. Tidak mungkin kita belanja sesuatu, barang yang tidak berguna untuk masyarakat. Kita bisa ingat, dulu APBD DKI menghabiskan banyak, tetapi masyarakat gak pernah merasakan. Kita masih ingat ada orang sakit, bisa dirumah tapi gak berani berobat ke rumah sakit karen hanya diganti 10%, 20% dan 50%. ***(1) Dengan penghematan uang seperti ini, uang untuk anak-anak sekolah sudah kami tingkatkan. Seorang anak bisa dapat Rp.600.000,-, kalo per tahun itu bisa dapet 7,2 juta. Ini semua karena penghematan-penghematan yang kami lakukan.*** Jadi prinsip kami, dan ada 1 pasal juga yang kita lakukan di tahun 2015. Ketika tidak ada kesepakatan dengan dewan, maka ada Undang-undang mengatur, kepala daerah boleh mengeluarkan Pergub kepada dera, dan itu yang kami lakukan. Sehingga dari peristiwa

itu, pada tahun 2016 sama-sama sepakat membuat perda APBD. Itulah dinamika yang kami alami.”

Jawaban Anis dengan durasi 2 menit

“Sebagai Gubernur yang berinteraksi dengan DPRD, maka Jakarta bukan satu-satunya Gubernur. Ada puluhan Gubernur, ada ratusan Walikota, dan ada ratusan Bupati. Apa yang terjadi? Prinsip utama dalam menyusun APBD, nomor 1, melihat RPJMD. Yang kedua, aspirasi warga yang terkait dengan periode itu. Yang ketiga, didalam proses penyusunannya, transparansi, komunikasi, saling menghormati, dan didalam kita menegosiasikan konten dari APBD, kita harus bisa menunjukkan dimana letak kepentingan warga, dan komunikasikan dengan warga dengan sebaik-baiknya. Yang sering terjadi sebenarnya semata-mata bukan kepentingan untuk 1-2 orang. Itu dimana-mana, di DPR manapun, DPRD manapun, seluruh dunia. Yang menjadi masalah adalah bagaimana seorang pemimpin bisa merangkul. *(2) Kami justru nanti akan mendekati DPRD dengan rasa hormat, bicarakan dengan baik, tidak mengorbankan prinsip, dan penjaga terabik adalah transparansi. (3) Laporkan pada publik, sampaikan pada publik tanpa merendahkan siapapun. InsyaAllah akan mendapat solusi dari kemacetan-kemacetan.*”

Tanggapan Djarot dengan durasi 1 menit 30 detik

“Kita sudah sepakati bersama, bahwa sistem penganggaran kita itu harus transparan dengan menggunakan teknologi elektronik. Untuk apa? Untuk membangun dan menjamin pemerintahannya yang bersih dan bebas dari korupsi. APBD itu adaah uangnya rakyat. Oleh karena itu, ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman di legislatif, selalu kami sampaikan, mari, kebiasaan-kebiasaan lama yang dulu pernah ada, misalnya mengambil alokasi anggaran untuk kepentingan yang tidak bermanfaat pada masyarakat harus dihentikan. Kita harus mempertanggungjawabkan APBD ini kepada masyarakat, dan memakai APBD ini sebesar-besarnya untuk membantu rakyat, terutama warga miskin. *(4) Dengan menyelamatkan APBD ini, kai bisa membantu lebih dari 700.000 anak yang mendapat KJP. Kemudian kami juga bisa memberikan jaminan sosial menyeluruh, memberikan jaminan subsidi kepada masyarakat.* Artinya apa? APBD harus diselamatkan. Disamping itu, infrastruktur juga harus kita bangun dengan baik perubahan sudah kita letakkan dan sebentar lagi kita akan selesai dengan baik. Terimakasih.”

Segment 2 (Pertanyaan dari Komunitas)

Moderator : “Saat ini, untuk melindungi kesehatan warga Jakarta, telah dilakukan berbagai macam program, namun belum ada program yang tampaknya belum berhasil mengatasi sumber penyakit secara efektif. Contoh sederhana, data BPS 2015 menunjukkan buruknya sanitasi dimana lebih dari 1 juta warga Jakarta belum berjangkaman sehat. Sementara laporan terbaru koalisi *smoke free* Jakarta menunjukkan ada sekitar 70% tempat umum yang melanggar Perda kawasan dilarang merokok. Artinya, mereka yang tidak merokok terancam kesehatannya, sementara yang merokok tetap dibayar jaminan kesehatannya jika mereka sakit. Pertanyaannya untuk paslon 3, dalam waktu durasi 2menit. Bila anda terpilih, terobosan kebijakan apa yang akan dilakukan agar masalah kesehatan bukan hanya dibereskan dari sisi kuratif atau pengobatan, namun lebih kearah pencegahan akar masalahnya, silahkan.”

Jawaban Anis dengan durasi 1 menit 30 detik

“Kita ingin setiap warga Jakarta merasa bersyukur bahwa tinggal di Jakarta warga mejadi sehat, dan itu artinya pemerintah dan seluruh masyarakat menyadari pentingnya gaya hidup sehat. Mencegah dari berbagai macam penyakit, baru kemudian membicarakan soal pengobatan bila sakit. Memang, selama inni bukan hanya di Jakarta, tetapi diseluruh tempat fokusnya pada pengobatan. Ketika kita bertugas, maka fokus kita adalah kesehatan warga dan kesehatan lingkungan. Kita akan merekrut tenaga-tenaga medis yang akan berkeliling dikampung-kampung, memastikan bukan saja keluarga sehat, lingkungannya juga sehat dan mendeteksi masalah-masalah, dan tidak boleh di Jakarta ada anak kelaparan. (5)*Saya datang disebuah tempat di Jakarta Utara, tepatnya di Koja, seorang nenek yang ketika ditemui, bukan saja renta, tapi mengataan “saya lapar pak”. Ini tidak boleh terjadi.* Jika kita memiliki petugas untuk mendeteksi ini. Lalu yang kedua, dari sisi penyelenggaraanya, pemerintah akan memastikan bahwa ketia ada masalah, ada dukungan, sumber daya, personalia untuk menyelesaikannya. Jadi mereka yang berkeliling, mereka memastikan pulang tak kembali tanpa dukungan mesti dibereskan. Bila ini kita kerjakan, maka aspek pengobatan yang sering muncul menjadi problema karena kepadatan yang luar biasa justru bisa kita cegah sama-sama. Konsentrasinya pada, memastikan warga sehat, lingkungan sehat dan memiliki personalia yang hadir ditempat itu. Terimakasih.”

Tanggapan Djarot dengan durasi 1 menit 30 detik

“(6)*Program yang sudah kita kerjakan adalah ketuk pintu layani dengan hati.* Puskesmas sebagi garis layanan terdepan layanan kesehatan harus menekankan arus prefentif dan promotif. Setiap saat petugas-petugas layanan ini akan datang kerumah-rumah warga untuk mengecek kesehatannya. Apakah ada penyakit TBC, penyakit

diare dan sebagainya. Pertama, ketuk pintu layani dengan hati betul-betul. Kedua, membangun sanitasi yang baik melalui program bedah rumah sekaligus dengan sanitasi yang baik. Ketiga, dengan mengefektifkan PKK dan Gasawisma untuk membrikan penyuluhan, penerangan kepada masyarakat yang rentan terhadap penyakit yang menular. **(7)Kegiatan ini sudah kita lakukan, dan sekarang ini kita mempunyai data yang falid tentang keluarga-keluarga yang seperti ini.** Dengan cara seperti itu akan memudahkan kami untuk melayani warg apabila terkena penyakit ataupun meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Ini kita lakukan terus-menerus. Dan yang terakhir, kita membangun RPTRA, ruang terbuka ramah anak dimasing-masing wilayah. Setiap RW nanti kita bangun RPTRA terutama yang padat penduduknya.

Tanggapan Sandiaga dengan durasi 1 menit 30 detik

“Namanya program Oke Ocare. Kita sudah mengidentifikasi lebih dari seratus ribu peserta baksos yang kita datangi diseluruh wilayah Jakarta. Kita melihat dari delapan koma empat triliun dana untuk program kesehatan lebih banyak kekuratif. Kita ingin ubah paling tidak dua kali lipat menuju promotif prefentif. **(8)Program Oke Ocare akan memastikan pola hidup sehat.** Saya bawa contoh Ibu Dahlia Alwi yang mempromosikan gaya hidup sehat dengan gaya makan makanan sehat. Dengan program Oke Ocar, dia bisa mengembangkan usahanya. Selain itu kita juga harus mulai belajar berolahraga yang rutin, lari, senam. Ibu-ibu, saya senam diberbagai tempat menunjukkan kalo kita bergaya hidup sehat. InsyAllah biao kesehatan nanti akan menurun. Kalo kita memiliki gaya semangat pola hidup sehat kita akan mampu untuk mengurangi biaya yang tidak akan berkelanjutan.”

Pertanyaan dari komunitas UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (pembicara Ibu Hermawati).

“Bapak calon Gubernur, dari dulu kami pengusaha kecil sealu mengalami masalah soal permodalan. Walaupun saat ini ada program KUR kita tidak bisa mendapatkan KUR tersebut karena bank tetap meminta agunan. Kalau Bapak terpilih, kira-kira terobosan apa yang akan Bapak lakukan untuk membantu kami supaya masalah ini bisa diatasi?”

Jawaban Sandiaga dengan durasi 1 menit 30 detik

“Terimakasih bu Hermawati, allhamdulillah hampir lima belas tahun lebih saya mendalami pemberdayaan UMKM. Ada tiga masalah utama. Pertama, lahan usaha. Banyak sekali UMKM yang tidak memiliki kepastian lahan usaha. Kami punya program Oke Oce yang memastikan garasi inofasi dan lahan usaha untuk para UMKM. Kedua, masalah pemasaran. Allhamdulillah dengan jaringan Oke Oce, kami sudah bisa

menghadirkan Oke Oce Mart. Ini adalah bukti bahwa dengan pemasaran yang berjejaring, insyaAllah kita bisa berpihak pada para pedagang kecil. Ketiga, bu Hermawati bercerita tentang permodalan. Saya kebetulan dibidang usaha keuangan permodalan. Oleh karena itu Program Oke Oce lah yang kami dorong. Kami adalah melihat bagaimana memberikan kredit khusus untuk perempuan. Kredit ini kita berikan tanpa jaminan dan kita berikan pendamping metoring. Kita akan hadirkan solusi masalah permodalan untuk UMKM yang berpihak.”

Tanggapan Djarot dengan durasi 1 menit

“Terimakasih, yang saya baca kemarin, untuk membikin Oke Oce Mart itu membutuhkan dan adua ratus juta rupiah. Bagaimana UMKM bisa mendapatkan dana sebesar itu? Oleh karena itu, kami lebih memberikan kewenangan dana pada UMKM dengan bagi hasil delapan puluh – dua puluh. Kami tidak bisa menyediakan anggaran dua ratus juta untuk satu Oke Oce Mart. Tapi kami mendorong pengusaha kecil mendapatkan barang dengan harga murah.sebagai distributor, ini sudah dilakukan di RPTRA dengan hadirnya PKK Mart. Dengan cara itu, maa masyarakat sekitar akan mendapatkan keuntungan serta harga yang murah.

Tanggapan Sandiaga dengan durasi 1 menit

“Terimakasih Pak Djarot. Allhamdulillah perhari ini kita sudah mendekati 12.000 peserta Oke Oce diseluruh Jakarta. Dan kami melihat untu Oke Oce Mart, Ibu Lilis seorang penderita lupus datang kepada saya memberikan ide usahanya, dan saya tanya berapa modalnya? Dan ibu itu menjawab dua ratus juta pak. Saya bilang, begini bu Lilis, saya tdak bisa jaji banak, karena ini masih taraf penjajagan. Lalu saya lempar ke jejaring Oke Oce, dan membuahkan hasil kepada bu Lilis. Sekarang sudah ada dua belas ribu, kalau dua ratus juta kita bagi, dari dua ratus aja yang ikut cuma satu juta pak. *(9)Allhamdulillah berkat pak Djarot memprofokasi kita, kita berhasil menghadirkan solusi untuk UMKM, dan Ibu Hermawati insyaAllah akan mendapatkan modal.*

Segment 3 : dengan tema Dari Masyarakat untuk Jakarta.

Pertanyaan dari Komunitas Perwakilan Masyarakat Transportasi, (pembicara Bapak Daryono).

“Pak, sekarang masih banyak warga yang penghasilannya dibawah UMP. Jadi mahalnya ongkos transportasi membuat mereka kesulitan. Katanya ada yang merencanakan tarif Rp.5000,- sementara online banyak membuat bonus potongan.

Apakah dimungkinkan tarif yang lebih murah atau digratiskan sekalian Pak untuk membantu warga yang kurang mampu dan tertarik menaiki angkutan umum?”

Jawaban Ahok dengan durasi 1 menit 30 detik

“Terimakasih pak Daryono. Nah itu kenapa kami sejak dua tahun yang lalu memaksa warga Jakarta menggunakan E-ticket. Misalkan dulu orang dari manggarai mau ke Blok M itu empat kali naik bus. Nah dengan adanya E-ticket, kami mulai tau orang ini naik seperti itu. Nah sekarang cuma naik satu kali bus. Ada beberapa rute yang sudah kami ubah juga. Jadi intinya memang dari E-ticketing. Perlu saya sampaikan kepada pak Daryono dan teman-teman, kami sebenarnya sudah menggratiskan pak sejak tahun yang lalu naik bus. Jadi kalo Bapak, Ibu punya gaji UMP tinggal lapor di bank DKI penerimaan gajinya. Maka otomatis bank DKI memberikan gratis. *(10)Sekarang para marbot, orang-orang yang tinggalnya dirumah susun, anak-anak, semua sudah gratis. Ini bagian dari kami menopang, supaya biaya transport mereka murah.* Hanya memang busnya yang perlu kami tambah. Rute sudah kami tambah seratus rute lebih yang langsung tujuannya sampai kemana. Sekarang lansia malahan yang tidak mampu bisa kami jemput dengan TransJakarta Care. Kami punya 26 unit. Jadi kalo orang yang pake kursi roda pengen dijemput,ga punya uang buat ke RS, tinggal telepon satu hari sebelumnya. Kami datang, kami jemput, kami urusin. Jadi sebenarnya yang gratis itu sudah kai lakukan. Integrasi tentu harus terintegrasi. Kami sudah kasih MRT dan LRT juga. Kedepan pasti nyambung.”

Tanggapan Anis dengan durasi 1 menit

Ketika kita ingin mengatakan mengintegrasikan, maka kita melihat mobilitas penduduk. Dan terakhir yang dilakukan *study* itu tahun 2007, udah sepuluh tahun yang lalu. Konsekuensinya, cara kita mengatur rute hari ini tidak mencerminkan kebutuhan warga, karena itu kita integrasikan dan rutenya disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas warga di Jakrta. Yang kedua, tidak kalah penting, kita malah akan mengajak lebih jauh dari penyedia transportasi online. Karena itu perlu waktu. Pada fase itu berintegrasi dengan penyedia online akan kami lakukan. Lalu yang ketiga, kami akan memastikan proses ini tidak *top down*, tapi *bottom up*. Teman-teman penyelenggara selama ini minim diajak. Kami akan melibatkan anda membantu merumuskan rutenya, prosesnya.

Tanggapan Ahok dengan durasi 1 menit

“Kadang saya suka heran juga, kami dianggap tidak *bottom up*. Sebenarnya ketika anda menggunakan tiket, menempel waktu keluar, itulah *bottom up* yang kita lakukan. Kami tau proses anda sampai kemana. Biasanya dulu, Kamp. Rambutan ke Blok M bisa tiga kali naik bus. Kenapa kami bisa tau banyak orang yang mau pengen Kamp.

Rambutan ke Blok M? Karena dia *taps*. Jadi ini satu juta lebih. Penumpang ini belasan juta dan butuh data. Makanya kami dengan pola seperti ini menjadi data. Kami akan terus membuat rute-rute yang baik. Bus kami bus trans duniaseмуa. Bahkan bus kami yang baru-baru ini *shockbreaker* bisa miring, supaya kursi roda itu bisa rata. Dan kita pun mengurangi 20% kapasitas kursi, supaya bisa hadap kedepan. Sehingga perempuan memiliki ruang yang nyaman didalam bus. Busnya semua sangat standar. Mengapa lambat? karena kami ingin produksi kalo bus ini lokal.

Pertanyaan dari Komunitas Rumah Susun dan Toilet untuk Semua Keluarga
(pembicara Bapak Sukarto)

“Pak, kami ini warga rusun Jatinegara yang direlokasi akibat normalisasi kali Ciliwung. Kami menderita tidak hanya sekedar ekonomi, tetapi juga secara mental. Kami benar-benar merasa drop. Saat ini kami sering tinggal di rusun yang saat ini sering bocor, padahal kami harus menanggung beban biaya bulanan terus-menerus. Bila Bapak terpilih, apakah Bapak tega untuk terus-menerus membebani kami dengan membiayai rusun yang bocor ini?”

Tanggapan Djarot dengan durasi 1 menit

“Hatur nuhun pak Karto. Kami sudah ke rusun Jatinegara. Memang ada beberapa yang *complain* tentang persoalan yang disampaikan. Sekarang begini, mari kita bandingkan dengan Kamp. Pulo seperti apa. Mereka yang masuk rusun Jatinegara itu mendapatkan fasilitas, mulai KJP, KJS, permodalan, bis Transjakarta gratis. Ada *feeder* bus. Jadi banyak sekali yang dimanfaatkan. Oleh sebab itu, kami mohon dengan sangat, kami tidak bisa memuaskan semua orang. Pasti ada yang *complain*. Dengan permohonan maaf kami berusaha memperbaiki, kalau ada yang bocor-bocor, meskipun itu yang bangun adalah PUPERA, tapi kami tanggung jawab untuk menyembuhkan yang bocor. Itu rusunnya adalah tiga puluh meter persegi, yang cukup layak untuk warga kita. Terimakasih.”

Tanggapan Anis dengan durasi 1 menit

“Jadi yang dibutuhkan warga disini adalah solusinya. Karena itu kenapa kita melihat masalah ini? Kita bayangkan seseorang tinggal di Jakarta, sebutlah 40-50 tahun sejak kedatangannya. Ada periode dimana mereka menggunakan rumah susun, seperti yang sudah anda miliki sekarang. Ditempat itu aan dipastikan yang sudah tinggal disana penyelenggarannya baik, manajemennya baik, dan itu artinya ada transparansi. Siapa yang mengelola, siapa yang bertanggungjawab bila ada masalah, dan menggunakan alat digital untuk bisa ada monitor yang baik. Tetapi itu tidak cukup. **(11)Kedepan, lewat program Oke Oce, ada peningkatan kesejahteraan, lalu yang tidak kalah penting,**

dari situ pindah naik kelas untuk memiliki rumah sendiri. Biak rumah tapak ataupun rumah susun tetapi memiliki rumah, dan ini yang kita siapkan solusinya adalah manajemen yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan dan punya rumah sendiri.

Pertanyaan dari Komunitas Nelayan (pembicara Bapak Iwan).

“Pak, kami nelayan sudah tinggal di pantai Jakarta turun-temurun. Apakah kehidupan kami sebenarnya diakui atau tidak? Jika iya, apa kebijakan pemerintah DKI Jakarta itu sebenarnya untuk masadepan kehidupan kami? Saya merasakan hal ini karena merasa program lain, seperti reklamasi lebih diperhatikan, sementara kehidupan kami para nelayan diabaikan.”

Jawaban Ahok dengan durasi 1 menit 30 detik

“Ya pak Iwan, (12)*Saya mau tunjukkan ini adalah nelayan muara angke. Rancangannya, kami tidak pernah punya niat untuk mengusir para nelayan. Ini tematik. Bahkan ada kanal untuk perahu nelayannya.* Ini adalah muara baru. Pantai Mutiara mengajukan izin untuk perumahan mewah, kami tolak. Kami memperluas justru disini, dapet 10 hektar. Untuk apa? Supaya nelayan ada tempat sandar, termasuk ada tempat penyimpanan ikan, termasuk ada tempat pengolahan ikan. Ini akan dimiliki nelayan. Tapi kita lihat, kita harus bisa menyelesaikan banyak tanggul. Jakarta ini 1,5 meter dibawah muka laut. Kita lagi meninggikan 3,8meter tanggul. Nah tanggulnya sedang dikerjakan. Ini adalah tanggul yang sedang dikerjakan dari Cilincing menuju Tanjung Priok. Ketika semua ini jadi, maka ini semua ada tambatan untuk perahu. Kita juga akan membangun restaurant apung supaya ibu-ibu nelayan juga bisa melaukan ini. Restaurant yang lama akan kami bongkar. Jadi sebenarnya lapangan bola angke, desisgn pengembangan terpadu muara angke ini sudah jadi semua. Ini ada hubungan dengan reklamasi? Reklamasi itu, nelayan pun bisa tinggal disana, karena 50% tanah itu punya DKI.”

Segment 4

Debat antar kadidat. Pertanyaan dilontarkan dari masing-masing paslon dan akan ditanggapi oleh paslon lawan. Untuk putaran pertama dimulai dari debat antar Calon Wakil Gubernur, dan putaran kedua antar Calon Gubernur.

Pertanyaan Sandiaga :

“Pak Djarot, disini lebih dari empat komunitas yang hadir, juga banyak warga Jakarta yang H2C (Harap-harap Cemas) karena sebentar lagi mau memasuki lebaran dan biasanya harga pangan itu melonjak tinggi. Saya waktu mulai proses ini delapan belas bulan, belum ada pak Anis waktu itu, saya masih sama temannya Ahok, itu harga cabe masih sekitar angka Rp. 50.000,- setelah itu kita lihat lagi harga-harga bahan pokok lainnya masih fluktuatif dan perhari ini pernah mencapai Rp.200.000,-. Warga mengeluh, UMKM mengeluh, komunitas-komunitas mengeluh, warga yang ada di garis batas kesejahteraan mengeluh karena Pemprov belum bisa menghadirkan solusi untuk harga yang terjangkau khususny sembako. Sebetulnya bapak punya *chance* untuk menjadi Gubernur, tetapi Bapak menyerahkan kepada Bapak Ahok. Luar biasa sekali. Oleh karena itu, saya minta Bapak bisa memberikan strateginya.

Tanggapan Djarot

“Terimakasih. Satu persoalan yang kemarin itu terjadi adalah melonjaknya harga bawang merah dan cabe. Kami sudah bekerjasama dengan Jawa Tengah untuk bisa mengambil cabe dan bawang merah dengan harga yang memadai. Kemudian kami juga sudah membangun namanya container pengawet untuk bawang merah dan cabe. Ini bisa bertahan enam bulan dan dengan cara seperti itu, maka harga bawang dan cabe di Jakarta itu bisa kita stabilisasikan. Kemudian kami melakukan operasi pasar, kita punya BUMD, ada *food station*, kita juga punya darma jaya untuk daging. (13)“***Saya yakin bahwa harga bisa kita kendalikan dengan sistem seperti itu Pak Sandi, terimakasih.***”

Tanggapan Sandiaga

“Terimakasih pak Djarot, tapi pada kenyataannya itu adalah janji-janji yang selalu disampaikan oleh Pemprov. Kenapa saya bilang Pemprov harus ambil inisiatif? Karena yang merasakannya itu adalah warga DKI. Mereka mengeluh UMKM karena biaya hidup meningkat. Harga sembako yang kami pantau sekarang sudah mulai perlahan-lahan naik. Memang kita yang berada dikelas atas tidak merasakannya, tetapi warga yang menengah kebawah itu mengeluh dan sangat-sangat menantikan solusi. (14)“***Solusi yang Bapak sampaikan tadi kelihatan enak, bagus banget Pak tadi disini. Tapi kenyataannya tidak seperti itu.*** Cabe malah melonjak, sekarang gula akan melonjak. Jadi menurut saya, kita perlu solusi”.

Tanggapan Djarot

(15)“***Begini, justru yang kita lakukan adalah mensubsidi kelompok-kelompok menengah kebawah melalui operasi pasar.***” BUMD kita melakukan operasi pasar dengan mensubsidi harga daging. Penerima KJP bisa membeli daging itu 1kg Rp.35.000,-, ayam Rp.10.000,-, beras Rp.6000,- dengan kualitas premium. Itu subsidi

untuk mereka yang tidak mampu. Oleh karena itu kemarin saya ke Jawa Tengah untuk bicara dengan Gubernur Jawa Tengah, sama petani Brebes. Ini akan kita bangun dan pasar-pasar grosir kita itu sedang kita bangun di Kramat Jati. Jadi jangan khawatir.

Tanggapan Sandiaga

“Kuncinya adalah perhatikan pasokan bahan-bahan makanan yang masuk ke Jakarta. Memastikan pasokan masuk itu kita lakukan dengan cara kemitraan dan kita bisa amankan pasokan itu terutama pada saat kita memasuki hari besar. Kedua, penyederhanaan rantai distribusi yang terlalu tertutup dan tidak berpikeadilan. Sehingga UMKM kita dicecilkan oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada kita. Itu jawabannya pak. *(16)Mudah-mudahan Anis-Sandi bisa menghadirkan harga yang lebih stabil kedepan.*”

Segment 5 - Putaran 1

Pertanyaan Ahok

Jadi ini yang mau kita tanyaka yang menarik ketika berbicara tentang reklamasi. Saya mengambil kumpulan berita. Ketika 3 Oktober pak Anis jelas mengatakan menolak reklamasi. 16 Desember 2016 menolak reklamasi. Tapi begitu masuk ke 8 Februari 2017, pak Anis mengatakan mau mengalihkan fungsi reklamasi untuk kepentingan publik. Lalu di Februari lagi bilang menolak reklamasi, tapi dibidang pulau reklamasi akan dibangun fasilitas publik yang bermanfaat untuk semua warga. Pertanyaan saya, dari 17 pulau reklamasi, ada satu pulau yang sudah dimanfaatkan oleh warga yang tidak sadar kalau pulau N itu Tanjung Priok. Itu sudah beroperasi hasil reklamasi. Pertanyaan saya, kalo itu memang untuk mempengaruhi biaya Logistik, kalo bapak menolak reklamasi, itu yang sudah terlanjur dibangun mau diapakan? dibongkar atau diapakan? Terus bagaimana kita menghadapi keputusan Pemerintah Pusat (Kepres) ini dari zaman pak harto, yang sudah diputuskan dari Bapenas .”

Tanggapan Anis

Ya saya rasa saya sepaham dengan pak Basuki bahwa kita perlu untuk memikirkan soal ini tapi pendekatan kita berbeda. Ini soal keberpihakan. Kita mau berpihak dengan yang sama, kita berpihak pada siapa. Jakarta diputuskan untuk punya lahan tambahan. Lalu lahan tambahannya untuk siapa? Disitu pertanyaan mendasarnya. Kepres 52 tahun 1995 menyatakan secara eksplisit dipasal 4, *(17)“Wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada Gubernur. Karena itu, ketika saya Gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok*

orang”. Jadi ketika ada lahan baru, saya katakan untuk kepentingan publik. Ini nomor satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, reklamasi yang sedang dijalankan sekarang itu berbeda dari yang ada di Kepres ini, beda sekali. Kalau anda lihat bentuknya, di Kepres itu berbeda sekali dengan yang sekarang.”

Tanggapan Ahok

“Saya kira jangan membohongi. Gambar peta reklamasi bukan dari saya. Dulu ada 18 pulau satu setengah pulau dipotong karena kena arus air panas PLTU, dan mau apa lagi? Seluruh hasil reklamasi sertifikatnya milik DKI. Lalu hampir 48% itu digunakan untuk fasum dan fasos untuk DKI. Lalu apa lagi? 5% dari tanah yang dijual oleh pegembang ini boleh dipakai oleh nelayan, untuk masyarakat. Apa lagi? Setiap rupiah tanah yang mereka jual 15% dari penjualan mereka NJOP itu dipakai untuk pembangunan sehingga kita akan dapat dalam 10 tahun 158 triliun kira-kira uang dari reklamasi. Kita bisa selesaikan kosep nelayan, semua tanggul utara termasuk LRT yang itu bangun. Jadi mau apa lagi manfaat untuk rakyat reklamasi ini”

Tanggapan Anis

“Saya rasa baik pak memang kalau jangan bohong saat kampanye. Warga Bukit Duri tau persis apa arti kebohongan dalam kampanye. Apa yang terjadi? Jadi kami ingin kepentingan Jakarta dilindungi. Apa dilindunginya? Kami ingin justru jangan muncul banjir. Ini unik. Airnya dipercepat ke laut, didepan lautnya disiapkan pulau-pulau untuk menamung air. Ini efeknya akan balik ke Jakarta dan kita akan merasakan banjir ditempat ini. Yang kedua, soal lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan justru banyak tersedia, bukan lewat reklamasi tapi lewat rehabilitasi 13 sungai di Jakarta. Rehabilitasi pantai-pantai di Jakarta. Itu menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak. Dan yang kalah penting, begitu kita membangun pulau-pulau disana, lalu menjadi pemukiman yang mewah, yang pasti pemiliknya buka para nelayan disini, mereka hanya bisa menonton dari jauh. Dimanakah letak kadilan kita?”

Tanggapan Ahok

(18)“Saya perlu jelaskan, Bukit Duri sekarang kali Ciliwung 50% beres, makanya banjir dari 2200 titik jadi tinggal 70 titik. Ini mesti jelas. Lalu bicara soal reklamasi, soal pulau-pulau, saya jelaskan. Ini ilmu ekonomi pak. Kami membuka LRT dan MRT satu triliun kira-kira membuka tiga puluh ribu sampai tiga puluh lima ribu tenaga kerja. Makanya LRT kami bisa membuka 2,2 juta. Jadi itu semua ada hitungannya. Setiap triliun yang anda investasikan akan menghasilkan. Jadi sekali lagi jangan mengacaukan seperti itu.”

Masuk pada Putaran Kedua

Pertanyaan dari Ahok

“Akhir-akhir ini pak Anis dan pak Sandi agak membingungkan soal DP Rp.0,- untuk pembelian tanah. Nah kemudian ini yang saya lihat untuk yang 7juta penghasilannya. Yang ingin saya tanyakan, rumah yang ingin Bapak sediakan itu rumah tapak atau rumah susun? Lalu untuk orang yang berpenghasilan 7juta atau 3juta? **(19) Karena pak Sandi juga bilang, orang yang gajinya empat juta kebawah gak bakalan mungkin beli rumah di Jakarta. Ini fakta.** Lalu gak mungkin rumah tapak, karena tanahnya mahal. Ini adalah rumah susun. Nah ini yang agak membingungkan saya. Saya yang tadi bilang tidak adil, justru kami mengadministrasikan keadilan sosial. Misalnya di Krukut. Kenapa kami memindahkan dia ke rumah yang lebih baik? Karena dia gak mampu beli rumah, makanya kami sediakan rumah susun. Harga sewa mahal, biasanya Rp.600.000,- s.d p.700.000,-. Mereka itu gak sewa. Kamu kalo punya *apartment*, biaya rawatnya tuh ukuran 36 bisa sampai Rp.800.000,- belum sewanya. Nah makanya kami buat pola yang beda. Nah makanya saya tegaskan dari pak Anis dan pak Sandi, rumah yang anda bangun itu tapak atau rumah susun, penghasilan 7juta atau 3juta, karena dibbilang tidak mampu.”

Tanggapan Anis

“Kalo boleh saya bilang *nyuwun sewu*, karena pemahaman bapak Basuki salah soal itu. Kami tidak membicarakan soal bangun rumah, kami membicarakan pembiayaannya. Kenapa? Yang bagun bisa pemerintah bisa swasta. Tapi yang kami siapkan instrumen pembiayaannya. Kenapa ini penting? Karena justru warga siapa saja bisa kemudian membeli rumah. Pilihan mereka tentu bervariasi. Bisa rumah tapak, bisa rumah susun dengan *range* harga yang bervariasi. Jadi bukan kami membangun rumah. Kalau kita berpihak pada rakyat kebanyakan, maka kita carikan solusi agar mereka bisa memilih yang sesuai dengan yang mereka mau. **(20) Tapi kalau kita hanya top down, mengerjakan yang mudah, cukup bangun rumahnya, lalu meminta mereka untuk masuk. Disitu perbedaan mendasarnya**”

Pertanyaan Terakhir – Khusus untuk kedua Calon Gubernur

Moderator; “Pilkada kali ini adalah pelajaran berdemokrasi yang luar biasa, bukan hanya bagi para pendukung tetapi anda berdua juga saling sindir, saling serang, saling tuding dan sangat bisa jadi ada perkataan dari satu sama lain yang telah membuat sakit hati, bukan hanya untuk anda berdua, tetapi juga keluarga anda. Jika forum ini menjadi ajang pamungkas, saat ini apa yang akan anda sampaikan pada kepada pihak lawan atas segala ucapan yang menyakitkan tersebut?”

Jawaban Anis

“Bantuan sosial berhenti, proyek berhenti, Perda berdasarkan sebuah agama muncul jika Gubernur baru muncul, itu semua keliru, itu semua salah. Gubernur baru justru akan mengantarkan Jakarta pada Pemerintahan yang lebih efektif, Pemerintahan yang merangkul semuanya, Pemerintahan yang merasa semua dirumahnya, termasuk kepada mantan lawan ketika Pilkada. Semua yang dikatakan diucapkan bagian dari sejarah. Bila ada yang keliru, kami mengucapkan permohonan maaf, dan kemudian kita bangun sama-sama Jakarta. Ketika kami menjadi Gubernur dan wakil Gubernur, maka mantan lawan pun adalah warga kita yang akan kita hormati, sebagaimana yang lain-lainnya. Karena itu kita mengajak pada semuanya, seluruh warga Jakarta. Dahulu pakai bambu rucing, sekarang menggunakan paku tusuk yang sebelah kanan untuk perubahan di Jakarta.”

Jawaban Ahok

“Terimakasih. Pertama saya ingin menyampaikan kepada pak Djarot dan keluarga kami berdua, kepada pak Agus, bu Silvi dan keluarganya, pasangan nomor 1. Juga tentu kepada pasangan nomor 3 dan keluarganya. Pasti didalam perdebatan apalagi kami kan pertahana, tentu kami mengeluarkan apa yang sudah kami kerjakan. Makanya kadang-kadang jadi seolah-olah menihilkan apa yang disebutkan dari pasangan nomor 1 dan nomor 3. Kan apa yang kami katakan ini apa yang sudah kami kerjakan, bukan akan kami lakukan. Makanya itu kesannya kadang-kadang seolah-olah kami meledek atau apa, bukan. Tidak ada sama sekali, ini kebetulan saja kami menjadi pertahana, kami bisa bercerita lebih banyak, karena semua yang kami pikirkan itu kami bicarakan. Ini sudah sehari-hari kami lakukan. Sekali lagi moho maaf, kepada warga Jakarta, saya sampaikan mohon maaf. Semoga kita bisa melihat Jakarta baru bersama.”

Penutup

Moderator; “Ada keluar permintaan maaf dari kedua belah-pihak. Jadi kalau para pemimpin kita saling bermaafan, pasti kita pendukungnya juga harus mengikuti seperti itu. Baiklah para hadirin, penonton, para paslon, para netizen, inilah akhir acara debat publik Pilkada DKI Jakarta putaran yang kedua tahun 2017. Debat ini debat pamungkas. Kerena itu, pastikan anda yang memiliki KTP DKI Jakarta menggunakan hak pilih anda pada tanggal 19 April mendatang. Atas nama KPU DKI Jakarta dan seluruh *station* TV yang menyiarkan acara debat malam ini, saya Ira Kusno megucapkan terimakasih atas kebersamaan anda. Ikat! Siapapun nanti yang terpilih untuk memimpin Jakarta lima tahun mendatang, yang harus kita kedepankan adalah menghormati segala perbedaan yang ada. Karena apapun pilihan kita, anda 2, anda 3, yang menang harus warga Jakarta, yang menang harus Merah-Putih, Indonesia.”